

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Inflasi

Dalam jurnal (F. Putra & M. Nurhidayati, 2020) pengertian inflasi menurut Boediono yaitu inflasi merupakan kecenderungan umum kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Jika hanya harga satu atau beberapa barang yang naik, hal tersebut belum dapat disebut inflasi. Namun, apabila kenaikan harga barang tersebut meluas dan menyebabkan kenaikan sebagian besar harga barang lainnya, maka hal itulah yang disebut inflasi.

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi yang menggambarkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum. Perhitungan inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga dari sejumlah barang dan jasa yang sering dikonsumsi masyarakat.(Firmansyah et al., 2024)

2.1.1.1 Menentukan Tingkat Inflasi

Angka inflasi dihitung berdasarkan indeks harga yang diperoleh dari berbagai barang yang dijual di pasar. Barang-barang ini umumnya merupakan kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan data harga, disusunlah angka indeks. Indeks yang mencakup semua barang yang dibeli konsumen disebut Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI) (Ningsih & Andiny, 2018).

Rumus untuk menghitung tingkat inflasi menurut (D. Ningsih & P. Andiny, 2018) adalah sebagai berikut:

$$In = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100$$

Keterangan:

In = Tingkat inflasi.

IHK_n = Indeks Harga Konsumen tahun berjalan.

IHK_{n-1} = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Inflasi

1. Jenis Inflasi Berdasarkan Sifatnya

Laju inflasi dapat berbeda antar negara maupun dalam periode tertentu pada satu negara. Menurut Nopirin (1987) dikutip dari jurnal (D. Widiarsih & R. Romanda, 2020) inflasi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi tiga jenis :

a. Inflasi Merayap (*Creeping Inflation*)

Ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga terjadi secara perlahan, dengan persentase kecil, dan dalam jangka waktu yang relatif panjang.

b. Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*)

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya mencapai angka dua digit atau bahkan tiga digit). Inflasi ini sering terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan memiliki sifat akselerasi, yaitu harga-harga meningkat

lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dampaknya terhadap perekonomian lebih serius dibandingkan inflasi merayap.

c. Inflasi Tinggi (*Hyperinflation*)

Merupakan inflasi dengan dampak yang paling parah. Harga-harga naik hingga lima atau enam kali lipat, menyebabkan nilai uang merosot tajam. Dalam situasi ini, masyarakat cenderung menukarkan uang dengan barang karena tidak percaya pada nilai mata uang. Inflasi tinggi biasanya terjadi saat pemerintah mengalami defisit anggaran besar yang ditutupi dengan mencetak uang, seperti dalam situasi perang atau krisis besar lainnya.

2. Jenis Inflasi Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan penyebabnya, menurut (A. Suhardi & K. Tambunan, 2022) inflasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis:

a. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand-Pull Inflation*)

Inflasi ini terjadi ketika perekonomian tumbuh pesat, sehingga tingkat pengeluaran masyarakat melebihi kemampuan ekonomi memproduksi barang dan jasa. Biasanya, hal ini terjadi pada masa dengan tingkat kesempatan kerja yang tinggi atau pada situasi khusus seperti perang atau ketidakstabilan politik.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah seringkali membelanjakan anggaran jauh lebih besar dibandingkan pajak yang diterima, sehingga harus mencetak uang atau meminjam dari bank sentral, yang kemudian mendorong kenaikan harga.

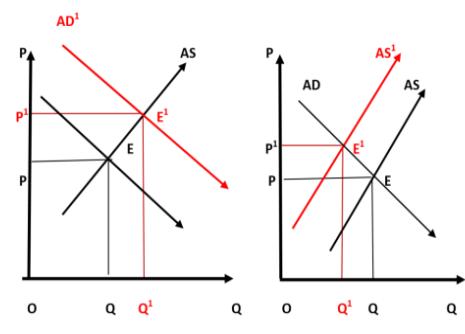
b. Inflasi Desakan Biaya (*Cost-Push Inflation*)

Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, seperti upah tenaga kerja atau harga bahan baku, yang mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Situasi ini sering terjadi pada masa dengan tingkat pengangguran rendah, di mana perusahaan:

1. Meningkatkan upah untuk mencegah tenaga kerja pindah.
 2. Menawarkan gaji lebih tinggi untuk menarik tenaga kerja tambahan.
 3. Kenaikan biaya produksi tersebut meningkatkan harga produk.

c. Inflasi Diimpor (*Imported Inflation*)

Inflasi ini terjadi akibat kenaikan harga barang impor yang memiliki peran penting dalam proses produksi. Ketergantungan pada barang impor, terutama bahan baku, dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi yang kemudian memengaruhi harga barang dalam negeri. Berikut disajikan gambar *demand pull inflation* dan *cosh push inflation*.



(DEMAND PULL INFLATION) (COST PUSH INFLATION)
Sumber: Kajian Akademis BPKK-Kementerian Keuangan 2016

Achmat Subekan dan Azwar

Gambar 2. 1Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation

Pada grafik *Demand Pull Inflation*, dimulai dari tingkat harga P dan output Q.

Q. Kenaikan permintaan agregat dari AD ke AD_1 menyebabkan sebagian permintaan tidak dapat dipenuhi oleh penawaran yang tersedia. Akibatnya, harga meningkat menjadi P_1 , dan output naik menjadi Q_1 .

Pada grafik *Cost Push Inflation*, dimulai dari tingkat harga P dan output Q.

Kenaikan biaya produksi (baik karena kenaikan upah yang diperjuangkan oleh serikat buruh maupun kenaikan harga bahan baku industri) menyebabkan pergeseran kurva penawaran agregat dari AS ke AS_1 .

Akibatnya, harga meningkat menjadi P_1 , sementara produksi menurun menjadi Q_1 . Proses ini akan berhenti jika kurva AS tidak lagi bergeser ke atas.

Proses kenaikan harga ini (yang sering disertai penurunan produksi) dikenal sebagai *Cost Push Inflation*.

3. Berdasarkan Parah Terjadinya Inflasi Tersebut (Boediono, 1985)

- a) Inflasi rendah, yaitu inflasi dengan tingkat kenaikan kurang dari 10% per tahun.
- b) Inflasi sedang, yaitu inflasi dengan tingkat kenaikan antara 10-30% per tahun.
- c) Inflasi berat, yaitu inflasi dengan tingkat kenaikan antara 30-100% per tahun.
- d) Hyperinflation atau inflasi tak terkendali, yaitu inflasi dengan tingkat kenaikan di atas 100% per tahun.

4. Jenis Inflasi Berdasarkan Asal

Menurut (Ghofur, 2007) dalam jurnal (Fadilla, 2017), inflasi berdasarkan asal dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Inflasi dalam negeri (*Domestic Inflation*)

Inflasi yang berasal dari faktor-faktor dalam negeri, seperti defisit anggaran belanja yang dibiayai melalui pencetakan uang baru, atau akibat gagal panen yang mengurangi ketersediaan barang

- b) Inflasi luar negeri (*Imported Inflation*)

Inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga komoditas di luar negeri, khususnya dari negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan negara tersebut. Jenis inflasi ini hanya terjadi pada negara dengan sistem perekonomian terbuka (Open Economy System) yang bergantung pada perdagangan internasional.

2.1.1.3 Dampak Inflasi

Menurut (N. Sucitrawati, 2013) berdasar pendapat Nanga (2005), inflasi dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesenjangan pendapatan, hal ini berdampak pada kesejahteraan ekonomi, karena inflasi dapat meningkatkan pendapatan riil bagi sebagian orang, sementara pendapatan riil orang lain justru menurun.

- 2) Menurunkan efisiensi ekonomi, inflasi dapat menurunkan efisiensi ekonomi dengan mengalihkan investasi dari sektor padat karya ke sektor padat modal, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran.
- 3) Mempengaruhi output dan kesempatan kerja, inflasi dapat mendorong perubahan dalam tingkat produksi dan kesempatan kerja dengan memotivasi perusahaan untuk menyesuaikan tingkat produksi mereka, baik dengan meningkatkan maupun mengurangi output.

2.1.1.4 Teori Inflasi

1) Teori Monetarist

Teori ini dipelopori oleh Milton Friedman, teori ini menekankan bahwa inflasi pada dasarnya adalah fenomena moneter. Milton berpendapat bahwa jika jumlah uang beredar yang banyak di masyarakat sama dengan inflasi. Disini suku bunga berperan sebagai alat untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Selain itu, dalam ekonomi terbuka, nilai tukar juga mempengaruhi jumlah uang beredar sehingga keduanya saling terkait dalam pengaruh inflasi.

2) Teori Keynes

Teori ini menjelaskan bahwa inflasi terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang melebihi jumlah barang yang tersedia. Kondisi ini disebut inflationary gap, yaitu ketika permintaan efektif pada tingkat harga tertentu melampaui jumlah maksimum barang yang dapat dihasilkan oleh masyarakat.

Akibatnya, harga-harga naik karena permintaan total lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia. Kenaikan harga ini menyebabkan rencana

pembelian barang oleh masyarakat tidak terpenuhi, sehingga mereka berusaha meningkatkan daya beli, baik melalui pencetakan uang baru oleh pemerintah, kredit bank oleh pengusaha, maupun tuntutan kenaikan upah oleh pekerja.

Dalam pandangan Keynesian, inflasi bisa dipengaruhi oleh suku bunga melalui mekanisme permintaan agregat (termasuk dari sektor ekspor). Ketika suku bunga rendah, pinjaman menjadi lebih murah, sehingga mendorong konsumsi dan investasi. Peningkatan agregat ini dapat melebihi kapasitas produksi, sehingga mendorong kenaikan harga (inflasi). Sebaliknya, suku bunga tinggi dapat menekan konsumsi dan investasi, sehingga menurunkan tekanan inflasi.

3) Teori Strukturalis

Teori ini didasarkan pada pengalaman negara-negara Amerika Latin dan menyoroti rigiditas struktur ekonomi di negara-negara berkembang. Menurut (Boediono, 1985), inflasi dalam teori ini dikaitkan dengan faktor struktural ekonomi, yang hanya bisa berubah secara bertahap dan dalam jangka panjang.

Tiga poin utama dalam teori ini:

- a) Menjelaskan inflasi jangka panjang di negara-negara berkembang.
- b) Mengasumsikan bahwa jumlah uang beredar bertambah secara pasif mengikuti kenaikan harga. Inflasi akan berlanjut hanya jika jumlah uang beredar terus meningkat. Tanpa kenaikan uang beredar, proses inflasi akan berhenti.

- c) Faktor-faktor struktural dianggap sebagai penyebab utama inflasi, namun tidak sepenuhnya struktural. Beberapa faktor sering kali disebabkan oleh kebijakan harga atau moneter pemerintah itu sendiri.

Dalam konteks negara berkembang, teori strukturalis menyoroti bahwa ketergantungan pada ekspor komoditas primer dapat memengaruhi inflasi. Ketika harga ekspor komoditas naik, pendapatan negara meningkat, tetapi bisa memicu inflasi.

4) Teori Paritas Daya Beli

Teori ini dikemukakan oleh ekonom Swedia, Gustav Cassel pada awal abad ke dua puluh juga membahas tentang inflasi. Menurut teori yang dikemukakan oleh Gustav Cassel ini, perbedaan tingkat inflasi antar dua negara akan memengaruhi nilai tukar mata uangnya. Yaitu, ketika nilai tukar suatu negara melemah (depresiasi), harga barang impor menjadi lebih mahal, yang kemudian dapat menyebabkan inflasi meningkat.

2.1.1.5 Efek Inflasi

Menurut (S. Indriyani, 2016), efek inflasi dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1) Efek pada Pendapatan (*Equity Effect*)

Inflasi berdampak tidak merata terhadap pendapatan, sehingga ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Mereka yang dirugikan adalah masyarakat dengan pendapatan tetap, individu yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai, dan pihak yang memberikan bunga lebih rendah dari tingkat inflasi. Sebaliknya, pihak yang diuntungkan adalah mereka yang

pendapatannya naik lebih cepat daripada laju inflasi, atau yang memiliki kekayaan dalam bentuk aset non-uang yang nilainya meningkat lebih besar dari tingkat inflasi.

Dengan demikian, inflasi dapat menyebabkan perubahan pola distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Inflasi berperan seperti "pajak" bagi sebagian orang dan "subsidi" bagi yang lain.

2) Efek pada Efisiensi (*Efficiency Effect*)

Inflasi dapat mengubah alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini terjadi karena peningkatan permintaan terhadap jenis barang tertentu yang mendorong peningkatan produksi barang-barang tersebut.

Ketika inflasi terjadi, permintaan terhadap barang tertentu meningkat lebih cepat dibanding barang lain, sehingga produksi barang tersebut pun cenderung meningkat.

3) Efek pada Output (*Output Effect*)

Inflasi dapat memengaruhi tingkat produksi. Dalam situasi inflasi moderat, kenaikan harga barang seringkali lebih cepat dibanding kenaikan upah, sehingga meningkatkan keuntungan pengusaha dan mendorong kenaikan produksi. Namun, jika inflasi mencapai tingkat yang sangat tinggi (*hyperinflasi*), hal ini justru dapat menyebabkan penurunan produksi.

Efek inflasi terhadap output bervariasi. Jika produksi barang meningkat, hal ini dapat sedikit menahan laju inflasi. Namun, apabila perekonomian mendekati

tingkat kesempatan kerja penuh (full employment), dampak inflasi terhadap output menjadi lebih besar. Dalam kondisi kesempatan kerja penuh, inflasi murni (pure inflation) cenderung terjadi, di mana kenaikan harga tidak diiringi dengan kenaikan output.

2.1.1.6 Cara Mencegah Inflasi

Berdasarkan persamaan Irving Fisher $MV = PT$, inflasi terjadi karena jumlah uang beredar (M) dan kecepatan peredaran uang (V) meningkat lebih cepat dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia (T). Untuk mencegah inflasi, salah satu variabel (M atau V) harus dikendalikan. Pengendalian ini dapat dilakukan melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, atau kebijakan lain yang mendorong peningkatan produksi.

1) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar agar tidak berlebihan, sehingga inflasi dapat ditekan.

Langkah-langkah kebijakan moneter meliputi:

a) Politik Diskonto

Bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kenaikan suku bunga membuat masyarakat dan lembaga keuangan enggan mengambil kredit karena biayanya lebih mahal. Dengan demikian, permintaan kredit menurun dan tekanan inflasi berkurang.

b) Operasi Pasar Terbuka

Bank sentral menjual obligasi atau surat berharga kepada masyarakat dan bank-bank lainnya. Penjualan ini menyerap jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun atau berkurang. Dengan begitu, operasi pasar terbuka ini akan menekan atau bahkan mengurangi lonjakan inflasi menjadi menurun.

c) Peningkatan Rasio Cadangan Kas (*Cash Ratio*)

Bank sentral meningkatkan cadangan wajib yang harus disimpan oleh bank komersial. Dengan menaikkan rasio cadangan, kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat juga menurun.

1) Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal bertujuan mengelola penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mengendalikan inflasi di daerah atau wilayah tertentu (misalnya suatu provinsi, negara atau wilayah pemerintahan lainnya). Ada beberapa langkah dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal. Langkah-langkahnya meliputi:

a) Pengaturan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah membatasi pengeluaran supaya anggaran tidak mengalami defisit. Langkah ini akan dapat membantu mengurangi tekanan inflasi yang tinggi yang disebabkan oleh belanja pemerintah yang berlebihan atau *over budget*.

b) Peningkatan Pajak

Dengan menaikkan pajak, pendapatan masyarakat untuk konsumsi akan berkurang. Penurunan daya beli masyarakat ini dapat mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga tekanan inflasi berkurang.

2) Kebijakan Non-Moneter

Merupakan langkah alternatif yang tidak terkait dengan uang beredar atau keuangan pemerintah. Beberapa langkahnya adalah:

a) Peningkatan Produksi

Pemerintah mendorong produsen untuk meningkatkan hasil produksi. Langkah ini dilakukan misalnya dengan memberikan subsidi atau prioritas pada sektor-sektor tertentu seperti bahan bakar dan pangan. Peningkatan jumlah barang yang tersedia dapat menyeimbangkan permintaan dan melalui kebijakan atau cara ini, pemerintah juga akan dapat menyeimbangkan lonjakan inflasi.

b) Kebijakan Terkait Output

Pemerintah dapat menurunkan bea atau pajak-pajak yang berlaku dan masuk untuk membantub mendorong impor barang-barang. Dengan demikian, meningkatnya impor akan menambah jumlah barang dalam negeri, sehingga harga barang-barang cenderung akan turun dan inflasi yang tinggi juga akan ikut menurun atau setidaknya dapat ditekan secara bertahap ke angka yang jauh lebih rendah .

c) Penentuan Harga dan Indeksasi (*Indexing*)

Pemerintah akan menetapkan harga maksimum (*ceiling price*) untuk barang-barang tertentu. Selain itu, upah atau gaji pekerja disesuaikan dengan indeks harga (*indexing*), sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga atau stabil meskipun terjadi kenaikan dan lonjakan harga barang-barang. Dengan kombinasi kebijakan-kebijakan ini, laju inflasi dapat dikendalikan secara efektif sehingga diharapkan akan dapat mengurangi atau bahkan menekan angka inflasi yang cukup tinggi.

2.1.2 Nilai Tukar Rupiah

Menurut Sukirno (2011) dikutip dari jurnal (Anugerah. & R. Dea, 2016) kurs valuta asing atau kurs mata uang merepresentasikan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Dengan demikian, nilai kurs juga dapat diartikan sebagai jumlah mata uang domestik yang diperlukan, yaitu jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.

2.1.2.1 Pengertian Nilai Tukar Rupiah

Kurs Rupiah, atau nilai tukar Rupiah, adalah perbandingan nilai atau harga mata uang Rupiah terhadap mata uang lain. Dalam perdagangan internasional, setiap negara memiliki alat tukar masing-masing, sehingga diperlukan angka perbandingan nilai antar mata uang, yang disebut kurs valuta asing atau kurs, Salvatore (2008) dikutip dari jurnal (Buana et al., 2016).

Nilai tukar terdiri dari dua jenis, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal (*nominal exchange rate*) adalah nilai yang digunakan untuk menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan nilai tukar riil (*real exchange rate*) adalah nilai yang digunakan untuk menukar barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain, Mankiw (2008) dikutip dari jurnal (A. Fahmi, 2019).

Kurs valuta asing bersifat fluktuatif, dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing biasanya dibutuhkan untuk pembayaran internasional, seperti impor, yang tercermin dari transaksi debit pada neraca pembayaran internasional. Sebuah mata uang dianggap kuat jika transaksi kredit otonom lebih besar dari transaksi debit otonom (surplus neraca pembayaran). Sebaliknya, mata uang dianggap lemah jika neraca pembayaran mengalami defisit, atau ketika permintaan terhadap valuta asing melebihi penawarannya Nopirin (2000) dikutip dari jurnal (A. Triyawan & S. Izaty, 2022)

2.1.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah

Menurut (R. Syahputra, 2017), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi nilai tukar Rupiah, yaitu:

- 1) Penawaran dan Permintaan Mata Uang Asing (*Supply and Demand Foreign Currency*)

Valuta asing (valas) atau *forex*, sebagai benda ekonomi, memiliki tingkat permintaan dan penawaran di pasar valuta asing (*forex market*).

2) Posisi Neraca Pembayaran (Balance of Payment/BOP)

Neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis atas semua transaksi ekonomi internasional yang mencakup perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

3) Tingkat Inflasi

Perubahan laju inflasi dapat memengaruhi tingkat permintaan dan penawaran valuta asing, yang selanjutnya berdampak pada nilai tukar.

1) Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga, mirip dengan pengaruh inflasi, juga dapat memengaruhi kurs valuta asing.

2) Tingkat Pendapatan

Apabila kenaikan pendapatan masyarakat di Indonesia cukup tinggi sementara jumlah barang yang tersedia relatif sedikit, maka impor barang cenderung meningkat, yang berdampak pada nilai tukar.

3) Pengawasan Pemerintah

Pengawasan pemerintah yaitu melalui kebijakan-kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan perdagangan luar negeri memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap nilai tukar atau valuta asing. Pengawasan dilakukan guna mengendalikan angka valuta asing yang berlaku dan akan mempengaruhi inflasi yang ada.

4) Ekspektasi dan Spekulasi (Isu dan Rumor)

Spekulasi atau isu, seperti rumor tentang devaluasi Rupiah akibat defisit akun berjalan (*current account*) yang besar, dapat memengaruhi nilai tukar, menyebabkan apresiasi atau depresiasi mata uang asing.

2.1.2.3 Teori Nilai Tukar

1) Teori Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity - PPP*)

Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh perbandingan tingkat harga di kedua negara. Dengan kata lain, mata uang suatu negara yang memiliki tingkat harga lebih rendah akan menguat dibandingkan mata uang negara lain, sehingga daya beli menjadi seimbang.

2) Teori Neraca Pembayaran (*Balance of Payments Theory*)

Menurut teori ini, nilai tukar dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran mata uang yang terjadi akibat transaksi neraca pembayaran suatu negara, seperti ekspor, impor, investasi, dan pinjaman luar negeri. Surplus neraca pembayaran cenderung memperkuat mata uang suatu negara. Sedangkan defisit neraca pembayaran cenderung melemahkan mata uang negara tersebut.

2.1.3 Suku Bunga

2.1.3.1 Pengertian Suku Bunga

Sunariyah (2004) dikutip dari jurnal (Risma et al., 2019) menyatakan bahwa tingkat suku bunga adalah persentase dari pokok pinjaman dalam satu unit waktu. Bunga dapat dianggap sebagai ukuran harga atas sumber daya yang

digunakan oleh peminjam, yang kemudian dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Umumnya, unit waktu dinyatakan dalam satuan tahun (satu tahun investasi), meskipun bisa juga lebih singkat.

Secara umum, suku bunga memiliki dua makna tergantung dari sudut pandangnya, yaitu bagi bank dan bagi pengusaha. Bagi bank, bunga merupakan pendapatan yang diperoleh dari peminjaman dana kepada nasabah atau pengusaha. Sedangkan bagi pengusaha, bunga dianggap sebagai biaya modal atau bagian dari ongkos produksi.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa suku bunga adalah harga yang harus dibayar oleh peminjam berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama.

Di Indonesia, suku bunga acuan dikenal sebagai Bank Indonesia Rate (BI Rate). BI Rate mencerminkan tingkat bunga jangka pendek yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai upaya untuk mencapai target inflasi. BI Rate digunakan sebagai pedoman dalam operasi moneter, dengan tujuan mengarahkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka satu bulan hasil lelang operasi pasar terbuka agar mendekati BI Rate.

Pergerakan BI Rate berfungsi sebagai patokan bagi suku bunga lain, seperti Pasar Uang Antar Bank (PUAB), suku bunga pinjaman, dan suku bunga jangka panjang lainnya. Dengan demikian, jika BI Rate meningkat atau mengalami kenaikan, maka suku bunga yang lainnya cenderung meningkat juga, dan begitu juga sebaliknya.

2.1.3.2 Fungsi Suku Bunga

Suku bunga memberikan keuntungan atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain, berdasarkan perhitungan waktu dan nilai ekonomisnya. Besarnya keuntungan tersebut dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Menurut (Sunariyah, 2013) suku bunga memiliki beberapa fungsi dalam perekonomian, yaitu:

- 1) Sebagai daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan dananya.
- 2) Sebagai alat kontrol pemerintah terhadap dana langsung atau investasi pada berbagai sektor ekonomi.
- 3) Sebagai instrumen moneter untuk mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam perekonomian.

2.1.3.3 Teori Suku Bunga

Terdapat beberapa teori mengenai suku bunga, salah satunya adalah sebagai berikut.

1) Teori Bunga Klasik

Menurut teori klasik, suku bunga merupakan harga atas penggunaan pinjaman atau harga yang terbentuk di pasar dana investasi dalam suatu periode tertentu. Dalam pasar ini, terdapat dua kelompok utama yaitu sebagai berikut :

- a. Kelompok penabung, yaitu individu atau pihak yang memiliki kelebihan dana pada periode tertentu.
- b. Kelompok investor yaitu individu atau pihak yang membutuhkan dana untuk melakukan investasi dan memperluas jaringan usahanya.

Melalui interaksi antara penabung dan investor di pasar dana investasi, terjadi proses tawar-menawar yang menghasilkan tingkat bunga keseimbangan. Tingkat bunga yang seimbang mencerminkan kondisi di mana dorongan untuk menabung sama besarnya dengan dorongan pengusaha untuk berinvestasi. Teori ini dikenal dengan istilah "*The Pure Theory of Interest*".

2.1.4 Jumlah Uang Beredar Syariah

2.1.4.1 Pengertian Jumlah Uang Beredar Syariah

Menurut (S. Sari, 2023) jumlah uang beredar secara umum adalah total uang yang tersedia dalam perekonomian pada suatu waktu, mencakup seluruh uang yang diterbitkan oleh bank sentral, bukan hanya yang dimiliki masyarakat.

Jika mengacu pada pengertian jumlah uang beredar (JUB) secara umum, maka jumlah uang beredar syariah (JUB syariah) dapat didefinisikan sebagai total uang yang beredar dalam perekonomian yang berasal dari kegiatan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dana yang disalurkan dan dikumpulkan oleh lembaga keuangan syariah tanpa mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

2.1.4.2 Teori Jumlah Uang Beredar Syariah

Teori jumlah uang beredar dalam ekonomi syariah tidak hanya melihat sisi kuantitatif (seperti dalam ekonomi konvensional), tapi juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, larangan riba, dan perputaran harta yang adil. Para ahli ekonomi Islam telah mengembangkan teori tersendiri mengenai uang dan jumlah uang beredar (money supply) dalam perspektif

syariah. Berikut beberapa teori-teori jumlah uang beredar syariah yang dikemukakan oleh para ahli syariah :

1) Teori M, Ummer Chapra (1992)

Umer Chapra menekankan bahwa dalam ekonomi Islam, uang bukan komoditas, tetapi alat tukar (medium of exchange). Maka:

- a. Jumlah uang beredar harus dijaga agar tidak menyebabkan inflasi atau deflasi.
- b. Uang tidak boleh beredar di kalangan orang kaya saja (QS Al-Hasyr: 7), sehingga sistem moneter Islam harus mendukung distribusi kekayaan yang adil.
- c. Uang beredar idealnya didukung oleh kegiatan sektor riil, bukan spekulasi atau instrumen berbasis bunga.

Teori Umar juga menyoroti bahwa jika jumlah uang beredar syariah meningkat pesat tanpa diimbangi pertumbuhan barang dan jasa, maka harga barang akan meningkat (tidak sesuai dengan keadilan ekonomi islam), akan tetapi belum tentu menyumbang inflasi secara umum dan uang tidak dianggap sebagai komoditas yang diperdagangkan, melainkan sebagai alat tukar yang harus dijaga stabilitasnya.

2) Monzer Kahf (1978)

Monzer Kahf pada teorinya di tahun 1978 melihat bahwa dalam sistem ekonomi Islam, kontrol terhadap uang beredar harus memenuhi beberapa syarat – syarat yang sesuai, yaitu:

- a. Mencegah pembentukan gelembung ekonomi (bubble).
- b. Menghindari praktik-praktik spekulatif yang tidak sesuai syariah.
- c. Ia mendukung kebijakan moneter yang berbasis moralitas, di mana uang beredar diarahkan untuk investasi produktif dan tidak membiarkan penumpukan kekayaan (hoarding).

2.1.4.3 Cara Menghitung Jumlah Uang Beredar Syariah

Junlah uang beredar syariah umumnya mencakup instrumen uang beredar dalam arti sempit (M1) atau dalam arti luas (M2), tergantung kebutuhan penelitian. Namun dalam konteks perbankan syariah, jumlah uang beredar syariah dapat dihitung atau didekati dengan menjumlahkan komponen-komponen utama berikut :

2.1.4.3.1 Pendekatan Jumlah Uang Beredar Syariah dari sisi Dana Pihak Ketiga (Simplikasi)

Rumus mencari jumlah uang beredar syariah (JUB Syariah) melalui simplikasi Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebagai berikut :

$$JUB \text{ Syariah} = Uang \text{ Kartal di Masyarakat (UKM)} + Giro \text{ Syariah} + \\ Tabungan \text{ Syariah} + Deposito \text{ Syariah}$$

Namun, jika data uang kartal tidak diketahui secara langsung, maka JUB Syariah bisa didekati dengan total DPK Syariah, yaitu :

$$JUB \text{ Syariah (pendekatan)} = Giro \text{ Syariah} + Tabungan \text{ Syariah} + Deposito \\ Syariah$$

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan atau keterikatan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian-penelitian tersebut dapat digunakan sebagai referensi atau bahan perbandingan untuk kajian penelitian yang sedang penulisss lakukan. Adapun penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel yang telah disajikan dibawah ini :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Peneliti	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Maulana, R. A., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2020). Pengaruh Ekspor, Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi di Indonesia.	Suku bunga, Nilai tukar rupiah dan Pengaruh Inflasi.	Jumlah uang beredar syariah.	Penelitian menunjukkan variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.	Dinamic: Directory Journal of Economic Volume 2 Nomor 3
2	(Kiganda, E. O., Obange, N., & Adhiambo, S. 2017). The relationship between exports and inflation in Kenya: An aggregated econometric analysis.	Exports and infation.	Exchange rate and interest rate	The results indicate that inflation has a significant positive long run relationship with total exports. This is a conclusion supported by variance decomposition and impulse analysis with a coefficient of 1.39 at 5% level of significance, implying that a percentage increase in total exports	Asian Journal of Economics, Business and Accounting 3(1): 1-12, 2017; Article no.AJEBA.33192

No	Judul dan Peneliti	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				increases long-run inflation in Kenya by 1.39%. In the short run, past values of total exports influence inflation negatively and there is a unidirectional causality from total exports to inflation	
3	(Ningsih, S. LMS, Kristiyanti (2019) Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2014-2016	Suku bunga, Nilai tukar dan Inflasi	Jumlah uang beredar, nilai tukar syariah.	Jumlah uang beredar, suku bunga dan nilai tukar secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Variabel nilai tukar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.	Jurnal Manajemen Dayasaing, 20(2), 96-103.
4	(Özen, E., Özdemir, L., & Grima, S. (2020). The relationship between the exchange rate, interest rate, and inflation: the case of Turkey.	Exchange rate, interest rate	and inflation.	There is a long-run relationship between the inflation rate and the exchange rate and interest rates and that the impact of the exchange rate on the Producer Price Index (PPI) is greater than the impact of interest rates.	Journal: Scientific Annals of Economics and Business
5	(Mahendra, A. 2016). Analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga sbi dan nilai tukar	Suku bunga, Nilai tukar dan Inflasi	Jumlah uang beredar dan nilai tukar syariah.	Jumlah uang beredar dan nilai tukar (Rp / USD) tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi sementara suku	Jurnal Akuntansi & Keuangan, 1-12. Riset

No	Judul dan Peneliti	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	terhadap inflasi di Indonesia.			bunga (SBI) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi.	
6	(Perlambang, H 2010). Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar terhadap tingkat Inflasi	Suku bunga, Nilai tukar dan Inflasi.	Jumlah uang beredar syariah.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan JUB tidak signifikan terhadap inflasi, SBI berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi dan Nilai tukar (Rp/USD) tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi	Media Ekonomi, 49-68.
7	(Senen, A. S., Kumaat, R. J., & Mandeij, D. 2020) Analisis pengaruh nilai tukar rupiah, suku bunga acuan bank Indonesia dan cadangan devisa terhadap inflasi di Indonesia periode 2008: Q1–2018: Q4	Suku bunga dan Inflasi.	Jumlah uang beredar syariah.	Nilai Tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia, BI Rate berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia, Cadangan Devisa tidak berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.	Jurnal Ilmiah Efisiensi, 20(01).
8	(Setiawan, A, 2023). Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar terhadap inflasi di indonesia.	Nilai tukar dan Inflasi.	Jumlah uang beredar syariah.	Nilai tukar berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap inflasi. JUB berpengaruh signifikan terhadap inflasi. BI Rate berpengaruh signifikan terhadap inflasi dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap daya beli rakyat.	Aktiva: Journal of Accountancy and Management, 1(1), 21-29.

No (1)	Judul dan Peneliti (2)	Persamaan Variabel (3)	Perbedaan Variabel (4)	Hasil (5)	Sumber (6)
9	(Bunga, 2022). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia.	S. Suku bunga, Nilai tukar dan Inflasi.	Jumlah uang beredar dan Inflasi. syariah.	Hasil penelitian didapatkan bahwa suku bunga dan uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi, sementara kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.	Journal of Business and Economics Research (JBE), 3(2), 225-231.
10	(D. Taufik 2021). Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Inflasi Indonesia 2001-2020	Nilai tukar, Suku bunga dan Inflasi.	Jumlah uang beredar syariah.	The results showed that the money supply partially had a positive and significant effect in the long term, while in the short term it had a partially positive and insignificant effect on the inflation rate. Interest rates partially had a negative and significant effect both in the short and long term on the inflation rate. Exchange Rate partially has a positive and insignificant effect in the long and short term on the Inflation Rate.	Jurnal Ecoment Global, 3(2), 95-108.
11	(Susmiati, S., Giri, N. P. R., & Senimantara, N. 2021). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs)	Nilai tukar Giri, N. P. R., dan Inflasi. & Senimantara, N.	Suku bunga dan Jumlah uang beredar syariah.	Secara parsial Jumlah uang berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh	Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ), 4(2), 68-74.

No	Judul dan Peneliti	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2011-2018.			positif signifikan terhadap tingkat inflasi. Secara simultan JUB dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia.	
12	(Albab, A. U., & Nugraha, J. 2022). Pengaruh nilai ekspor dan impor migas dan non-migas terhadap inflasi di Indonesia.	Inflasi.	Jumlah uang beredar syariah.	ekspor migas berpengaruh terhadap inflasi, eksport non-migas tidak berpengaruh terhadap inflasi, impor migas berpengaruh terhadap inflasi, impor non-migas tidak berpengaruh terhadap inflasi.	Independent: Journal of Economics, 2(1), 116-132.
13	(Rumondor, N., Kumaat, R. J., & Tumangkeng, S. Y. 2021). Pengaruh Nilai Tukar dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia Pada Masa Pandemic COVID-19.	Nilai tukar, dan Inflasi.	Suku bunga dan Jumlah uang beredar syariah.	(1) Nilai tukar rupiah terhadap dolar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia, (2) Jumlah uang beredar secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia dan (3) Nilai tukar rupiah terhadap dolar dan jumlah uang secara simultan beredar berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.	Jurnal Ilmiah Efisiensi, 21(3).
14	(Azizah, L. 2020). Pengaruh nilai	Nilai tukar dan Inflasi.	Suku bunga dan Jumlah	Secara simultan terdapat pengaruh antara	Ecodunamika, 3(2).

No	Judul dan Peneliti	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	tukar rupiah dan jumlah uang beredar uang beredar luas terhadap inflasi di Indonesia periode 2010-2019.	uang beredar syariah.		nilai tukar rupiah dan jumlah uang beredar luas terhadap inflasi di Indonesia tahun 2010 – 2019.	
15	(Panjaitan, P. D., Purba, E., & Damanik, D. 2021). Pengaruh jumlah uang beredar dan nilai tukar terhadap inflasi di Sumatera Utara.	Nilai tukar dan inflasi.	Suku bunga dan Ekspor.	Nilai tukar rupiah terhadap dollar US tidak dapat dijadikan tolak ukur tingginya inflasi di Sumatera Utara. Sebab inflasi juga dapat terjadi akibat tingginya permintaan terhadap barang dan jasa tertentu semerterna produksi telah padakesempatan keja penuh.	Jurnal Ekuilnomi, 3(1), 18-23.
16	(Amaliyah, F., & Aryanto, A. 2022). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Terhadap Inflasi di Indonesia.	Suku bunga dan Inflasi.	Nilai tukar dan Jumlah uang beredar syariah.	Jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia periode 2015-2020. Sedangkan variabel suku bunga tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia periode 2015-2020.	Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(2), 1342-1349.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur konsepual yang mengorganisir teori, konsep, dan varaibel dalam penelitian (Syahputri et al., 2023).

2.2.1 Hubungan Nilai Tukar dengan Inflasi

Hubungan antara nilai tukar dan inflasi dijelaskan oleh teori Paritas Daya Beli. Menurut teori ini, perbedaan tingkat inflasi antar dua negara akan memengaruhi nilai tukar mata uangnya. Ketika nilai tukar suatu negara melemah (meningkat), harga barang impor menjadi lebih mahal, yang kemudian dapat menyebabkan inflasi meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Elisa Chandra dan Diah Wahyuningsih menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Artinya, peningkatan nilai tukar cenderung meningkatkan inflasi (E. Chandra & D. Wahyuningsih, 2021)

Variabel nilai tukar memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (A. Sriwahyuni et al., 2020) bahwa nilai tukar memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Sumatera Utara. Fluktuasi suku bunga yang dapat dikendalikan mendorong perkembangan sektor riil dan sektor moneter dalam perekonomian. Hal ini secara khusus meningkatkan kegiatan investasi dan minat menabung di masyarakat, sehingga masyarakat tidak terdorong untuk mengalihkan investasinya ke luar negeri.

2.2.2 Hubungan Suku Bunga dengan Inflasi

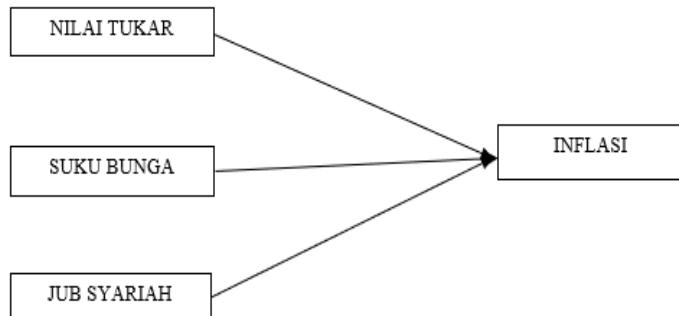
Hubungan suku bunga dengan inflasi dijelaskan oleh teori Keynesian. Dalam pandangan Keynesian, inflasi juga bisa dipengaruhi oleh suku bunga melalui mekanisme permintaan agregat (termasuk dari sektor ekspor). Ketika suku bunga rendah, pinjaman menjadi lebih murah, sehingga mendorong konsumsi dan investasi. Peningkatan agregat ini dapat melebihi kapasitas produksi, sehingga mendorong kenaikan harga (inflasi). Sebaliknya, suku bunga tinggi dapat menekan konsumsi dan investasi, sehingga menurunkan tekanan inflasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sri wahyuni et al., 2020) menyatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2017) menyatakan bahwa suku bunga SBI memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Rasyidin et al., 2022) dimana hasil penelitian ini menyatakan suku bunga memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap inflasi.

2.2.3 Hubungan Jumlah uang beredar syariah dengan Inflasi

Hubungan jumlah uang beredar syariah dengan inflasi dijelaskan oleh teori Umer Chapra (1992). Teori ini menyoroti bahwa jika jumlah uang beredar syariah meningkat pesat tanpa diimbangi pertumbuhan barang dan jasa, maka harga barang akan meningkat tetapi belum tentu menyumbang inflasi secara umum.



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga secara parsial nilai tukar, suku bunga dan jumlah uang beredar syariah berpengaruh negatif terhadap inflasi di Indonesia.
2. Diduga secara bersama-sama nilai tukar, suku bunga dan jumlah uang beredar syariah berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.
3. Diduga inflasi bersifat elastis terhadap perubahan nilai tukar, suku bunga dan jumlah uang beredar syariah.